



ORCA

Media Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KILAS KINERJA 2025

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi ke-8 pada bulan Desember 2025 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal untuk menyebarkan berbagai informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir perkuat kebijakan pengawasan PSDKP, cerminkan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi ke-8 "ORCA" mengulas kinerja Direktorat Jenderal PSDKP bulan Desember 2025 dan juga kinerja selama periode satu tahun dengan berbagai capaian dan fokus pengawasan yang akan dijalani pada tahun 2026

Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami. Namun demikian, Tim Redaksi mengakui kekurangan dan mengharapkan masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi ke-8 ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya
Tim Redaksi

Pengarah:

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM

Direktur Jenderal PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM

Plt. Sekretaris Ditjen. PSDKP

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Drs. Halid K Jusuf, MPA

Direktur Pengawasan Sumber Daya

Perikanan

Teuku Elvitrasyah, SH., MM

Direktur Penanganan Pelanggaran

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Redaktur:

Sahono Budianto, Sunaryo,
Rochman Nurhakim, Annis Susanti, Ikrom
Bungsu, Febri Firmansyah Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian Ragas,
Hadi Purwanto

Produksi:

Tim Kerja Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal PSDKP

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 10.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspdkp@kkp.go.id

4 INFO UTAMA

- 4 Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6,15 Triliun dari Pengawasan
- 6 Siapkan 1,046 Triliun Perkuat Pengawasan di Tahun 2026

10 KILAS KINERJA

- 8 KKP Kerahkan Armada Laut dan Udara Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra
- 9 KKP Kembali Kirim Bantuan Kemanusiaan via Laut ke Lokasi Bencana Sumatra
- 11 Dua Kapal *Illegal Fishing* Tangkapan KKP Diserahkan ke Pemda Sulut

14 KILAS UPT

- 13 Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Penyelundupan Ikan Dilindungi dan Satwa Liar di Perbatasan
- 15 Sinergi PSDKP Batam dan Bea Cukai Kepri Lepasliarkan Benih Bening Lobster

18 PERSPEKTIF

- 16 Inovasi Pengawasan Perikanan Budidaya Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru Yang Berkelaanjutan Di Provinsi Papua Barat

24 SOSOK

- 24 Sigit Bintoro, Kepemimpinan Berintegritas dalam Pengawasan Kelautan dan Perikanan

26 PSDKP MENGAJAR

27 PSDKP MENJAWAB

28 LENSA PSDKP

39 INFO KINI

SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA 6,15 TRILIUN DARI PENGAWASAN



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mencatat capaian signifikan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dari berbagai kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, Ditjen PSDKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp6,15 triliun.

Capaian tersebut merupakan bagian dari dukungan Ditjen PSDKP terhadap kebijakan Ekonomi Biru, yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045," ujar Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal PSDKP.

Dalam pemberantasan *illegal fishing*, Ditjen PSDKP berhasil menangkap 351 kapal perikanan ilegal serta menertibkan 104 unit rumpon ilegal. Dari tindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp3,79 triliun.

"Kapal tersebut terdiri Kapal Ikan Indonesia (KII) sebanyak 329 dan Kapal Ikan Asing (KIA) sebanyak 22 dengan bendera China, Vietnam, Malaysia dan yang dominan adalah berbendera Filipina," jelas Ipunk.

Selain itu, pengawasan sumber daya kelautan dilakukan terhadap berbagai aktivitas seperti 12 pemanfaatan ruang laut, 18 reklamasi dan wisata tirta, lima terminal khusus atau TUKS, -

satu kabel bawah laut, serta pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) sebanyak 54 pelaku usaha.

"Dari hasil pengawasan tersebut kerugian negara sebanyak Rp2,1 Tiriliun telah kami selamatkan. Dan di tahun 2025 kemarin pengawasan kelautan juga diperluas dengan pengawasan pemanfaatan air laut atau ALSE," kata dia.

Pada sub sektor sumber daya perikanan, Ditjen PSDKP menggagalkan penyelundupan 1.314 juta benih bening lobster (BBL), 5.400 butir telur penyu senilai Rp540 juta. Pengawasan obat dan pakan ikan ilegal turut dilakukan dengan temuan 2.135 kilogram obat ikan dan pakan ikan.

"Masifnya perkembangan teknologi, Ditjen PSDKP juga memanfaatkan *Open Source Intelligence* (OSINT) yang menemukan adanya jual beli ikan membahayakan dan merugikan di platform *e-commerce* dengan total 1.250 ekor ikan disita," jelas Ipunk

Secara keseluruhan, Ditjen PSDKP telah melakukan penanganan pelanggaran sebanyak 8.503 kasus, dimana 8.464 dikenakan sanksi administratif dan 39 dikenakan proses pidana.



Ke depan, Ditjen PSDKP akan terus memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta kerja sama nasional dan internasional guna menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, Ditjen PSDKP juga aktif dalam aksi kemanusiaan melalui program PSDKP Peduli dan keterlibatan sebagai Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatra. Sebanyak 257,9 ton bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah di Pulau Sumatra dengan dukungan delapan armada pengawasan.

Ditjen PSDKP juga terus mendorong pemanfaatan *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagai alat pemantauan aktivitas kapal perikanan, upaya deteksi dini kecelakaan di laut, serta sarana memastikan hasil tangkapan ikan berasal dari praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan.

SIAPKAN 1,046 TRILIUN PERKUAT PENGAWASAN DI TAHUN 2026



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp1,046 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung kebijakan Ekonomi Biru serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut nasional.

Outlook Pengawasan SDKP Tahun 2026 disusun sebagai acuan strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan armada, sumber daya manusia, teknologi pengawasan, serta sinergi lintas sektor.

Direktur Jenderal PSDKP, Ipunk, menegaskan bahwa pengawasan memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. "Pengawasan adalah fondasi utama Ekonomi Biru. Tanpa pengawasan yang kuat, keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum tidak akan tercapai," ujar Ipunk.

Pada tahun 2026, Ditjen PSDKP menargetkan pelaksanaan 75 hari operasi kapal pengawas, 120 hari operasi pesawat patroli, serta 20 hari operasi speedboat. Operasi tersebut akan difokuskan pada wilayah perairan rawan pelanggaran, termasuk perairan perbatasan dan daerah dengan intensitas aktivitas perikanan yang tinggi.



Selain operasi patroli, pengawasan juga mencakup 1.049 unit usaha pengawasan sumber daya kelautan serta 1.622 unit usaha pengawasan sumber daya perikanan. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut dan perikanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aspek penegakan hukum, Ditjen PSDKP menargetkan penanganan 145 perkara pelanggaran kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2026. Penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memberikan efek jera sekaligus menjamin kepastian hukum.

Ipunk menekankan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. "Kami ingin memastikan hukum ditegakkan secara tegas namun tetap berkeadilan, sehingga pelaku usaha patuh dan ekosistem laut tetap terlindungi," katanya.

Untuk menjaga kesiapan operasional, Ditjen PSDKP mengalokasikan anggaran bagi perawatan 121 unit armada pengawasan serta penguatan tiga unit prasarana PSDKP. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan armada pengawasan selalu dalam kondisi siap operasi.

Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui pengoperasian Pusat Pengendalian (PUSDAL) serta pengembangan Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) sebagai sistem pengawasan terintegrasi berbasis data dan teknologi.

Menurut Ipunk, pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam pengawasan kelautan dan perikanan modern. "Pengawasan saat ini harus berbasis data dan teknologi. Sistem terintegrasi memungkinkan respons yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang lebih akurat di lapangan," ujarnya.

Dari sisi sumber daya manusia, anggaran tahun 2026 juga dialokasikan untuk belanja pegawai bagi 1.496 orang, sekaligus mendukung operasional dan manajemen pada 15 unit kerja Ditjen PSDKP di pusat dan daerah.

Partisipasi masyarakat tetap menjadi salah satu pilar pengawasan. Pada tahun 2026, Ditjen PSDKP menargetkan pembinaan terhadap 1.110 kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Ipunk menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan tambahan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. "POKMASWAS adalah mitra strategis kami. Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan menjadi lebih luas, efektif, dan berkelanjutan," katanya.

Dengan Outlook Pengawasan SDKP Tahun 2026, Ditjen PSDKP optimistis pengawasan kelautan dan perikanan akan semakin kuat, adaptif, dan terintegrasi, sekaligus berkontribusi nyata dalam mewujudkan Ekonomi Biru menuju Indonesia Emas 2045.



KKP KERAHKAN ARMADA LAUT & UDARA KIRIM BANTUAN KEMANUSIAAN KE SUMATRA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana alam, khususnya para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pelepasan bantuan berupa 10.000 kaleng ikan olahan hingga kebutuhan pokok menggunakan pesawat pengawasan (Airborne Surveillance) dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (2/12).

"Sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono pada hari ini kami melepas misi KKP untuk Sumatra menggunakan pesawat pengawasan," ungkap Direktur Jendral PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) selaku Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatra.

Selain melalui jalur udara, KKP juga mengerahkan KP. Hiu Macan 05 dari Pelabuhan Bandar Deli Belawan menuju Langsa dan Lhokseumawe, Provinsi Aceh pada Senin kemarin. Kapal tersebut membawa total 12 ton logistik, terdiri dari 2 ton bantuan KKP dan 10 ton bantuan dari Polda Riau, yang terdiri dari beras, obat-obatan, air mineral, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan wanita, pakaian, serta selimut.

Sedangkan, bantuan untuk wilayah Sibolga di Sumatra Utara, KKP mengerahkan KP. Hiu 12 dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kutara Banda Aceh pada sejak pagi tadi pukul 05.30 WIB. Logistik yang dikirim sekitar 5 ton mencakup air kemasan, ikan kaleng, mie instan, biskuit, sembako, perlengkapan bayi dan wanita, serta obat-obatan.

KKP melalui posko di Padang Sumatera Barat juga telah menyalurkan bantuan sejumlah 6 ton yang mencakup sembako, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.



Punk menambahkan bahwa pengiriman bantuan akan terus dilakukan secara bertahap dengan dukungan kolaborasi KKP bersama instansi terkait khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) setempat.

Satgas KKP untuk Sumatra akan terus mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menugaskan Satgas KKP untuk terus melakukan identifikasi dan pendataan masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana, antara lain pembudidaya, nelayan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk selanjutnya dilakukan proses pemulihan usaha secara bertahap.

KKP KEMBALI KIRIM BANTUAN KEMANUSIAN VIA LAUT KE LOKASI BENCANA SUMATRA



KILAS KINERJA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Padang, Sumatra Barat, Sibolga dan Tapuli Tengah, Sumatra Utara serta Lhokseumawe Aceh. Kali ini, KP. Orca 05 yang mengangkut 60 ton paket bantuan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara pada Sabtu (06/12).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau langsung proses pemuatan barang bantuan di KP. Orca 05 menyampaikan, ini merupakan trip keenam pengiriman yang telah dilakukan KKP. Paket bantuan yang dikirim berasal dari donasi para pegawai KKP, serta partisipasi berbagai pihak termasuk dari instansi kementerian/lembaga lainnya.

"Selain dari KKP, ada juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pariwisata, dari influencer Atta Halilintar, serta masyarakat kelautan perikanan di sekitar ini yang secara sukarela menitipkan barang bantuan untuk kita bawa ke sana," ungkap Menteri Trenggono bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan di lokasi.

KKP telah membentuk Tim Satgas dengan tim tersebar di titik-titik lokasi bencana. Di lokasi, tim KKP menggunakan starlink untuk menginformasikan kebutuhan apa saja yang paling diperlukan di lapangan.

Menurutnya, satgas telah bergerak cepat dengan mengerahkan armada kapal pengawas dan pesawat patroli untuk mendistribusikan bantuan secara bertahap ke wilayah paling terdampak.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal PSDKP (Ipunk) selaku Komandan Satgas KKP Peduli Bencana KKP -

memaparkan bahwa selain mengerahkan logistik, KKP juga membuka penggalangan donasi pakaian layak pakai yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak para korban.

"Setelah selesai proses pengangkutan, jumlah bantuan yang termuat sebanyak 60 ton. Hari ini diberangkatkan satu kapal pengawas dari Jakarta membawa bantuan dari KKP dan masyarakat menuju Padang, Sibolga dan Tapanuli Tengah, serta Lhokseumawe Aceh," ungkap Ipunk.

Ia menambahkan kapal ini merupakan kapal keempat yang diberangkatkan ke lokasi bencana. Sebelumnya, KKP telah mengerakkan tiga kapal pengawas ke Lhokseumawe, Langsa, dan Sibolga, serta satu pesawat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mengirim bantuan ke Lhokseumawe dan Aceh Tenggara.

"Sampai dengan Sabtu (6/12) Satgas KKP Peduli Bencana Sumatra telah mendistribusikan berbagai jenis bantuan seberat 108 ton," tambah Ipunk.

Selanjutnya, Satgas KKP Peduli Bencana akan terus mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. "Satgas KKP juga masih terus membuka bantuan dari berbagai pihak termasuk swasta yang akan memberikan bantuan kepada korban bencana melalui KKP," pungkas Ipunk



DUA KAPAL ILEGAL FISHING TANGKAPAN KKP DISERAHKAN KE PEMDA SULUT



Dua unit kapal pelaku ilegal fishing yang berhasil ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas masyarakat nelayan di Sulawesi utara.

KKP bersama Kejaksaan Agung telah resmi menyerahkan dua kapal ikan FB. ST. BOBBY-01 berukuran 151 G dan FB. ST. MICHAEL-138 berukuran 66 GT ke Pemda Sulawesi Utara. Kapal-kapal ini sebelumnya ditangkap oleh KP Orca 06 Ditjen PSDKP di perairan Samudera Pasifik pada tahun 2024. Selanjutnya menjadi barang bukti proses hukum di Pengadilan Negeri Bitung hingga akhirnya diputus untuk negara

"Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pemulihan Aset, Kejati Sulut, serta Kejari Bitung atas sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kebijakan KKP untuk pemanfaatan kapal rampasan hasil tindak pidana perikanan," ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (30/12).

Ipunk menambahkan bahwa saat ini kebijakan KKP, dalam pemanfaatan kapal tangkapan illegal fishing yaitu menggunakan prinsip "tangkap-manfaat", bagi kapal-kapal hasil tindak pidana perikanan yang telah inkrah.



"Kapal-kapal tersebut tidak lagi dimusnahkan/tenggelamkan lagi, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yaitu diberikan kepada masyarakat tepatnya kepada Kelompok Nelayan dan/atau Koperasi Perikanan," jelas Ipunk.

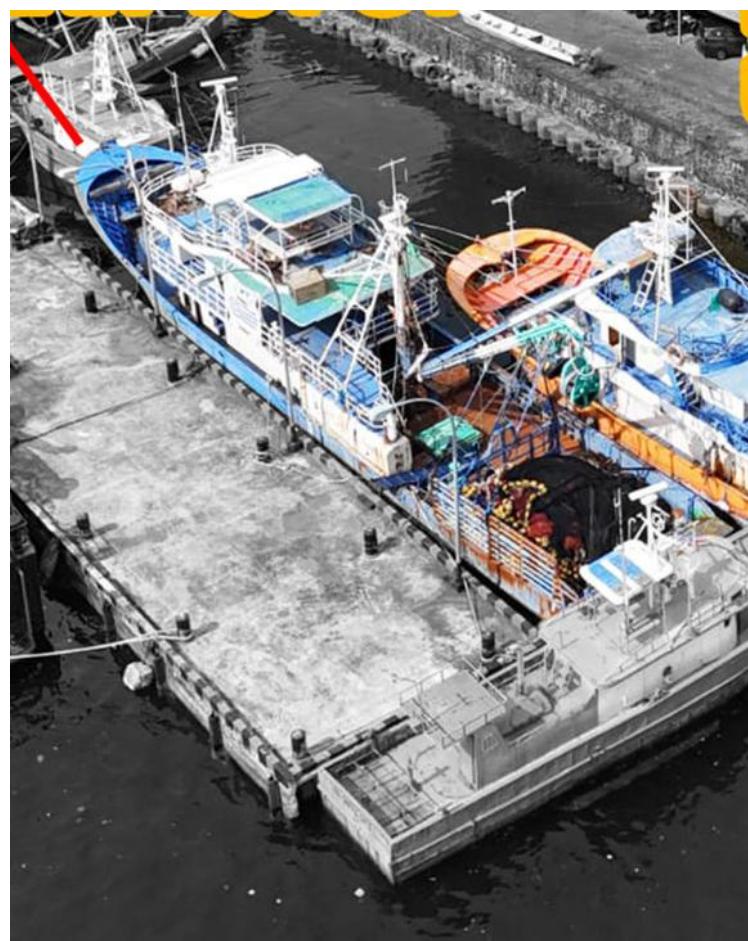
Ia juga memaparkan bahwa perairan utara Sulawesi ini merupakan salah satu perairan yang rawan illegal fishing terutama dari nelayan Filipina. Kapal asing asal Filipina menggunakan kapal penangkap ikan yang modern, kapal terbuat dari besi, ukurannya besar, alat tangkap dan teknologinya modern.

"Melalui pemanfaatan kapal-kapal tangkapan, setidaknya menjadikan nelayan kita dapat bersaing dengan nelayan-nelayan asing, sehingga kita mampu berdaulat diperairan kita sendiri," tambah Ipunk.

Selanjutnya Ipunk menyarankan kepada Pemda Sulut agar kapal ini bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan, dengan lebih dulu mengurus dokumen perizinan.

"Kedua kapal yang diserahkan ini agar dikelola dimanfaatkan kepada penerima yang benar-benar siap dan mampu mengoperasikan, jangan justru malah nanti mangkrak. Pemda harus selektif dalam memilih penerima," tegas Ipunk.

Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan harus memberikan manfaat ekonomi bagi negara maupun masyarakat khususnya nelayan.



INDONESIA-MALAYSIA PERKUAT KERJA SAMA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN IKAN DILINDUNGI DAN SATWA LIAR DI PERBATASAN

Stasiun PSDKP Pontianak



Perkuat kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan penyelundupan jenis ikan dilindungi lintas batas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Kerja Sama Pemberantasan Penyelundupan Ikan Dilindungi, Tumbuhan dan Satwa Liar yang diselenggarakan di Sarawak, Malaysia, pada 14-16 Desember 2025.

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, menegaskan bahwa kerja sama lintas negara ini memiliki peran strategis dalam menjaga wilayah perbatasan dari berbagai aktivitas ilegal.

"Kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan penyelundupan ikan dilindungi, tumbuhan, dan satwa liar lintas batas merupakan langkah strategis yang sangat penting, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak yang memiliki tantangan pengawasan cukup kompleks," ujar Bayu.

Pertemuan di Sarawak ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang sebelumnya diselenggarakan oleh Ditjen PSDKP di Jakarta pada September 2025. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan operasi-

bersama Indonesia-Malaysia di wilayah perbatasan (sepadan) yang telah dilaksanakan pada 4-8 November 2025.

Menurut Bayu, evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. "Evaluasi ini diperlukan agar ke depan operasi bersama dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata dalam pencegahan serta penindakan kejahatan lintas batas," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas rencana jangka panjang kerja sama Indonesia-Malaysia dalam menjaga wilayah perbatasan dari berbagai kegiatan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan pemanfaatan ikan dilindungi, tumbuhan, serta satwa liar. Diskusi difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas pengawasan di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Malaysia menyepakati sejumlah langkah strategis yang dirangkum dalam Ringkasan dan Tindak Lanjut Kerja Sama Malaysia-Indonesia dalam Memerangi Kejahatan Satwa Liar Lintas Batas. Kesepakatan tersebut mencakup penguatan pertukaran informasi dan intelijen, pelaksanaan operasi penegakan hukum bersama, serta kelanjutan dan perluasan pelatihan serta pertukaran keahlian antarpetugas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat perbatasan juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan kejahatan sejak dulu. "Tidak hanya penegakan hukum, keterlibatan masyarakat perbatasan sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah sepadan," tambah Bayu.



Kerja sama ini juga mencakup penguatan mekanisme repatriasi satwa liar hasil sitaan, pembiayaan proyek bersama, serta dukungan pembangunan yang relevan dengan upaya konservasi sumber daya alam. Kedua negara sepakat bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Indonesia dan Malaysia merencanakan pertemuan lanjutan pada tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Malaysia. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi, mengevaluasi implementasi tindak lanjut, serta merumuskan langkah strategis baru dalam menjaga wilayah perbatasan dari aktivitas ilegal.

Melalui kerja sama yang erat dan berkesinambungan ini, Ditjen PSDKP optimistis upaya pemberantasan penyelundupan ikan dilindungi, tumbuhan, dan satwa liar dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendukung perlindungan keanekaragaman hayati serta kedaulatan sumber daya alam Indonesia di kawasan perbatasan.



SINERGI PSDKP BATAM DAN BEA CUKAI KEPRI LEPASLIARKAN BENIH BENING LOBSTER

Pangkalan PSDKP Batam

Dalam rangka memperkuat sinergitas antarinstansi dalam upaya pemberantasan peredaran ilegal Benih Bening Lobster (BBL) serta mendukung pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, Pengawasan Perikanan Pangkalan PSDKP Batam bersama Bea dan Cukai Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan pelepasliaran Benih Bening Lobster.

Kegiatan pelepasliaran tersebut dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, pukul 16.00 WIB, bertempat di Perairan Jembatan Enam, Kota Batam, yang merupakan wilayah konservasi yang telah ditetapkan. Pada kegiatan ini, telah dilepasliarkan sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis pasir ke perairan tersebut.

Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Semuel Sandi Rundupadang, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

"Pelepasliaran Benih Bening Lobster ini merupakan bentuk komitmen kami bersama Bea dan Cukai dalam menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap peredaran BBL ilegal, sekaligus sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah Kepulauan Riau," ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara PSDKP dan Bea Cukai Khusus Kepri dalam pengawasan dan penanganan BBL, serta wujud kepedulian bersama terhadap kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.





INOVASI PENGAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI BIRU YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh:
Maulana Achmad Triyanto

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan modal strategis bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat Khususnya dan Indonesia Pada Umumnya. Keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan melalui penyediaan protein hewani, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi biru (Blue Economy) yang menempatkan kelestarian ekosistem sebagai dasar pertumbuhan. Konsep ekonomi biru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar kawasan pantai (Septianda, 2024). Dengan memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara bijaksana, diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Wulandari, 2015).

Ekonomi Biru adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan bagi komunitas lokal, dan mengurangi kemiskinan di daerah pesisir (Lutvia et.al, 2021). Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, kita juga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang (Sridadi, 2024). Dengan demikian, pembangunan berbasis ekonomi biru merupakan langkah yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan pesisir.

Perikanan budidaya merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang yang produksinya melampaui produksi perikanan tangkap. Potensi produksi lestari perikanan laut mencapai 9,3 juta ton per tahun sementara produksi lestari perikanan budidaya mencapai 56,8 juta ton per tahun (BPS, 2024). Meskipun demikian, pertumbuhan sektor perikanan budidaya juga memberikan tantangan dalam aspek pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan diketahui bahwa Pengawasan perikanan budidaya tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga menyangkut keamanan pangan, biosecuriti, penegakan hukum, integritas data produksi dan efektivitas pemanfaatan ruang perairan. Tantangan ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan akan manajemen terpadu, terlebih kurang tersedianya data mengenai produksi perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat, luasnya wilayah yang diawasi serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk menjangkau wilayah yang perlu diawasi. Inovasi pengawasan menjadi keharusan untuk memastikan bahwa perikanan budidaya di Provinsi Papua Barat dapat terus berkembang tanpa merusak lingkungan dengan tetap memberikan manfaat ekonomi dan mendukung tujuan ekonomi nasional dalam penguatan ketahanan pangan dan ekonomi biru. Esay ini bertujuan untuk memberikan inovasi yang relevan dan strategi yang dapat diterapkan dalam pengawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

B. METODE

Pengambilan data menggunakan metode wawancara langsung dilapangan menggunakan metode survey yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah variabel pada suatu kelompok masyarakat melalui wawancara langsung dan berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Singarimbun, 1995). Purposive sampling digunakan karena sasaran sampling telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan (Mulyatiningsih, 2011). Wawancara dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dengan responden yang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pengawas Perikanan yang terdapat di Provinsi Papua Barat pada tanggal 13 dan 14 November 2025. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang bersifat eksploratif yang bertujuan untuk mendapatkan fakta yang ada. Penelitian eksploratif digunakan untuk menemukan sesuatu yang baru dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu (Hardani et.al, 2020). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena yang biasanya merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif (Priyono, 2016).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan kegiatan perikanan budidaya dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL&PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 di Kabupaten Manokwari,-

Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana. Jumlah pengawasan Budidaya dapat dikatakan minimal bila dibandingkan dengan jumlah pengawasan Kapal Perikanan Tangkap yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Hal ini disebabkan karena anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan pada seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat tergolong minimal sehingga alokasinya 2 difokuskan pada pengawasan kapal perikanan tangkap yang rutin melakukan penangkapan ikan dan berpotensi melakukan pelanggaran.

Hasil pengawasan pada pelaku usaha Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum melengkapi dokumen administratif untuk pelaksanaan usaha budidaya (DKP Papua Barat, 2023). Dokumen administratif yang dimaksud seperti belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) atau Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB). Nomor induk berusaha merupakan dokumen yang dapat diajukan melalui Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA) sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan (pengawasan menjadi transparan dan terstruktur sesuai peraturan. Dampak dari pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya di OSSRBA per Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah sulitnya melakukan pengawasan berbasis resiko pada kegiatan Budidaya Perikanan.

Selain permasalahan tersebut, masih terdapat potensi tantangan bagi pengawasan perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat seperti terjadinya-

degradasi lingkungan serta terjadinya potensi konflik ruang akibat lemahnya pendataan unit budidaya yang ada. Degradasi lingkungan dapat disebabkan karena adanya limbah yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi dan kerusakan ekosistem. Degradasi lingkungan juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit pada biota budidaya. Pengawasan terhadap kualitas air, lalu lintas benih, lalu lintas pakan serta pengawasan terhadap limbah buangan. Degradasi habitat juga dapat disebabkan karena terjadinya potensi konflik ruang yaitu kegiatan budidaya sering berbenturan dengan aktivitas pariwisata, perikanan tangkap dan konservasi laut. Pengawasan spasial akan menjadi sangat penting dalam menunjang keberlanjutan pengelolaan kawasan sehingga sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya analisis kebijakan yang dapat dijadikan sebagai inovasi pengawasan perikanan budidaya sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi biru yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Analisis kebijakan yang dimaksud yaitu sebagai terjemahan dari analysis for policy, bukan analysis of policy yang proses kebijakannya diawali dengan perumusan kebijakan, dilanjutkan dengan implementasi kebijakan, dan kemudian evaluasi kebijakan (Dwidjowijoto, 2006). Analisis kebijakan lebih berkenan dengan bagaimana pengambil keputusan mendapatkan sejumlah alternatif kebijakan yang terbaik. Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan.



Inovasi dalam pengawasan Perikanan budidaya tidak hanya mengenai penggunaan teknologi modern tetapi juga tentang pembenahan sistem tata kelola, peningkatan kapasitas masyarakat serta kolaborasi multipihak. Pengawasan yang inovatif akan memperkuat ketahanan pangan karena memastikan produksi budidaya tetap stabil tanpa merusak lingkungan. Inovasi pengawasan ini mendukung konsep ekonomi biru yang menekankan keterpaduan antara pemanfaatan sumberdaya dan keberlanjutan ekosistem, terlebih di Provinsi Papua Barat yang memiliki kawasan konservasi yang cukup luas. Inovasi pengawasan akan menjadi sangat strategis untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dengan konservasi.

a. Inovasi Pengawasan Budidaya Perikanan Berbasis Digital

Persoalan minimnya dana pengawasan serta lemahnya data perikanan budidaya di Provinsi Papua Barat merupakan dasar diperlukannya inovasi pengawasan berbasis digital. Kahadiran teknologi saat ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pengawasan sumberdaya perikanan pada umumnya dan perikanan Budidaya Khususnya. Teknologi tersebut dapat menjadi peluang karena teknologi telah lekat dalam kehidupan manusia saat ini. Gadget yang dimiliki dapat menjadi mesin informasi yang sangat ampuh dalam menggapai lingkungan yang lebih luas. Teknologi tersebut menjadi tantangan jika pelaku usaha maupun aparatur pengawas tidak dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara tepat. Pengetahuan terhadap teknologi akan memberikan dampak positif pada lingkungan seperti mudahnya-

memperoleh informasi serta perluasan jaringan karena adanya kemudahan dalam berkomunikasi. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi sangatlah diperlukan untuk mengoptimalkan bisnis yang dilakukan. Pada era revolusi industri 4.0 kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data yang secara masif membuat pemanfaatan data lebih efisien dengan sistem server serta mengintegrasikan keseluruhan kegiatan otomasi dalam satu sistem. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pada industri 4.0 pelaku usaha membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat satu keputusan melalui satu kombinasi sistem fisik-cyber, Internet of Things (IOT)/ internet untuk segala serta internet of systems. Berdasarkan hal tersebut maka inovasi yang dapat dilakukan dalam pengawasan perikanan budidaya adalah sebagai berikut:



- Aplikasi Mobile untuk Pengawasan Partisipatif. Model community based monitoring merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan karena lebih² efektif dengan jangkauan pengawasan yang luas dengan biaya yang tidak besar. Aplikasi mobile ini dapat didesain dengan melibatkan pembudidaya dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, melaporkan informasi kualitas air harian, laporan sumber benih, laporan sumber pakan, laporan kematian ikan, informasi harga pasar dan lain sebagainya. Dengan adanya data yang realtime, pembudidaya dan pengawas akan dapat menerima notifikasi ketika parameter melewati ambang batas. Aplikasi dengan basis IOT akan meningkatkan kecepatan deteksi dini, stabilitas produksi, efisiensi penggunaan pakan dan keamanan lingkungan.
- Sistem Informasi Pengawasan yang terintegrasi. Sistem pengawasan terintegrasi merujuk pada pengawasan yang terkoordinasi dan terpadu antar berbagai pihak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien dan mencegah tumpang tindih fungsi, dengan setiap pengawas saling berbagi informasi dan mendasarkan keputusan pada data yang terhubung. Sistem informasi pengawasan yang terintegrasi ini dapat memperkuat data yang terdapat pada OSS-RBA dengan mengintegrasikan data yang diperoleh pada aplikasi Mobile Pengawas partisipatif. Sistem informasi pengawasan yang terintegrasi juga dapat mengintegrasikan hasil uji laboratorium, produksi panen, mapping ruang laut yang memungkinkan petugas pengawas melakukan risk based supervision, evaluasi izin usaha -

secara cepat serta pengambilan keputusan berbasis Bukti.

- Pengembangan E-Licence dan Sertifikasi Online untuk Produk Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat. Saat ini media digital atau perangkat lunak banyak digunakan untuk keperluan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Digitalisasi akan terus menghadirkan kemungkinan penggunaan peralatan digital yang secara otomatis dapat digunakan dalam pendidikan dan merupakan solusi kecerdasan buatan yang terukur dan dapat diterapkan secara luas (Mavlutova et al, 2020). Seluruh ijin budidaya, sertifikasi cara budidaya yang baik dan pelaporan yang dilakukan secara digital dapat memberikan dampak pada peningkatan transparansi, mempercepat validasi data, mempermudah audit serta mengurangi pungli.

b. Inovasi Pengawasan Budidaya Perikanan Berbasis Digital

Penguatan kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi sebuah organisasi atau institusi agar dapat menjalankan tugas dan tujuannya secara optimal. Proses ini melibatkan peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi fungsi-fungsi yang ada, pemanfaatan teknologi, dan penguatan struktur serta tata kelola organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik, seperti tata kelola pemerintahan yang baik atau organisasi yang tepat fungsi. Penguatan kelembagaan akan sangat mendukung implementasi dari inovasi pengawasan budidaya perikanan berbasis digital. Beberapa hal 4 yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan pengawasan Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

- Penguatan Kapasitas Pengawas serta Penambahan Sumberdaya Manusia dan Sarana Pengawasan. Keterbatasan sumberdaya pengawas sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan, terlebih bila sumberdaya pengawas kurang kompeten dalam penguasaan teknologi informasi. Selain diperlukannya penambahan sumberdaya manusia serta sarana pengawasan yang memadai, pengawas perikanan juga perlu didrong untuk memiliki kompetensi digital yang dapat memberikan dampak pada kemampuan menganalisis data, memiliki pemahaman IOT serta mampu menginterpretasikan citra satelit. Kompetensi ini diperlukan bukan hanya untuk efisiensi dalam pengawasan tetapi juga dapat mempermudah penyampaian laporan terkini kondisi pengawasan di Provinsi Papua Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
- Kolaborasi Multipihak. Kolaborasi multipihak merupakan salah satu pendekatan partisipatif dari pihak yang berkepentingan (stakeholders) perikanan budidaya diantaranya pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sekitar melalui Kelompok masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Budidaya, akademisi, pelaku usaha budidaya, komunitas pembudidaya, penyuluh perikanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan startup teknologi informasi. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengambilan keputusan karena masyarakat dapat menentukan arah dan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat.-

Kolaborasi multipihak akan dapat mendorong inovasi untuk lebih cepat dan berkelanjutan. Keterlibatan multipihak dalam suatu kegiatan yang terkait dengan pengelolaan alam dan lingkungan telah dirasakan manfaatnya di berbagai daerah terutama terkait dengan implementasi kebijakan (Innes and Booher, 2003 in Dewi et al, 2012). Berbagai forum, konsorsium, dan kelompok kerja dibentuk guna lebih mengoptimalkan tujuan kegiatan yang hendak dicapai. Pembentukan lembaga di luar lembaga formal yang terlibat ini, akan lebih mengefektifkan proses diskusi dan koordinasi antar instansi formal, karena dalam sebuah forum, konsorsium maupun kelompok kerja, semua pihak setara. Semua pihak duduk bersama melakukan dialog dalam memecahkan persoalan secara. Kesepakatan yang dicapai diterima oleh semua pihak karena tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya.

- Regulasi Berbasis Ekosistem. Inovasi teknologi perlu disertai penguatan kelembagaan melalui pelatihan bagi pengawas untuk meningkatkan kompetensinya serta dukungan kebijakan baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah mengenai ekonomi biru dan prioritas pemgembangan budidaya yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam implementasi. Peraturan yang dibentuk harus mengintegrasikan antara daya dukung lingkungan, zonasi wilayah pesisir, biosekuriti dan standar teknologi budidaya. Regulasi berbasis ekosistem adalah kerangka kerja pengelolaan terpadu yang mempertimbangkan interaksi kompleks antara komponen biologis (manusia, tumbuhan, hewan) dan abiotis (lingkungan fisik) di suatu wilayah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pengawasan yang inovatif diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung pada tercapainya ketahanan pangan melalui kualitas dan kuantitas produksi budidaya secara berkelanjutan. Kualitas lingkungan perairan tetap terjaga dengan memastikan produktivitas budidaya tetap stabil dalam jangka panjang. Selain itu implementasi ekonomi biru dapat berjalan lebih optimal karena industri perikanan budidaya mempu tumbuh secara ekologis, ekonomis dan sosial. Inovasi pengawasan di Provinsi Papua Barat berpotensi mendorong daerah untuk menjadi sentra perikanan budidaya yang modern, ramah lingkungan dan berdaya saing global. Hal ini akan membantu pencapaian visi pembangunan daerah yang menempatkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan panduan dalam pencapaian tujuan pengawasan Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat. Adapun rekomendasi strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Pilot Project IOT dan Dashboard Terpadu. Pilot project dapat dilakukan di beberapa lokasi strategis misalnya dilaksanakan pada Kabupaten yang memiliki produksi budidaya tinggi. Dalam pilot project tersebut dapat dilakukan pemasangan sensor, menguji integrasi data dan menyusun Standar perasional Prosedur (SOP) respons.
- Peta Zonasi dan Pemantauan Berbasis Internet. Kolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat membantu mendeteksi perubahan pada lahan budidaya secara cepat karena dapat dilakukan dengan basis citra satelit secara periodik.
- Penguatan Kapasitas Lokal. Program pelatihan bagi pengawas perikanan, penyuluh perikanan, pembudidaya skala kecil terkait penggunaan teknologi, biosekuriti dan pencatatan produksi diperlukan dalam rangka membangun basis data dan informasi. Dengan adanya data dan informasi yang periodik, akan memudahkan dalam pengawasan dan penentuan kebijakan. Insentif untuk Kepatuhan. Insentif berupa akses pasar dan sertifikasi bagi pembudidaya yang terintegrasi dan menerapkan praktik CBIB serta sistem Traceability dapat menjadi stimulus bagi kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini diperlukan dalam rangka fairness sehingga pelaku usaha tidak hanya mendapatkan hukuman atas pelanggaran, tetapi juga diberikan apresiasi bila patuh dalam penerapan aturan yang telah ditetapkan. Mekanisme Pelaporan Masyarakat. Mekanisme pelaporan dengan kanal pelaporan yang mudah, baik melalui aplikasi maupun hotline yang diintegrasikan dengan sistem pengawasan resmi untuk memastikan tindak lanjut diperlukan. Minimnya informasi atau bahkan ketiadaan aplikasi maupun hotline kadang menjadi faktor penghambat dalam penyampaian informasi atas pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya kemudahan ini, tidak hanya kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) budidaya yang dapat memberikan laporan tetapi juga masyarakat sekitar atau pemerhati lingkungan juga dapat memberikan laporan kaitan terjadinya pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti oleh pengawas perikanan. Kolaborasi Multipihak. Forum kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten,

akademisi, LSM dan sektor swasta diperlukan dalam rangka pendanaan, pengujian dan menskalakan inovasi pengawasan. Kolaborasi multipihak ini juga akan memudahkan dalam pengawasan perikanan budidaya di lapangan.

C. KESIMPULAN

Inovasi pengawasan perikanan budidaya merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi biru yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Pemanfaatan teknologi, penguatan tata kelola, pemberdayaan masyarakat dan penyelarasan regulasi merupakan pondasi penting bagi sistem pengawasan yang efektif di Provinsi Papua Barat. Pengawasan perikanan budidaya yang-

inovatif dan terintegrasi merupakan kunci bagi Provinsi Papua Barat untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dan mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan.

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kami Sampaikan Kepada Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat (Zulkifli Henan, S.Pi, M.Pi) serta Staf Pengawas Perikanan (Eka Budi Setiawan, S.Pi, M.Pi) atas dukungan moril maupun spirituill sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Essay ini.





Sigit Bintoro, S.Pi., M.Pi

KEPEMIMPINAN BERINTEGRITAS DALAM PENGAWASAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sigit Bintoro merupakan figur sentral dalam memastikan terlaksananya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan berintegritas. Sigit dikenal tenang dalam pengambilan keputusan, tegas dalam prinsip, serta adaptif terhadap dinamika dan perubahan. Baginya, kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk memberi contoh dan arah serta keteladanan.

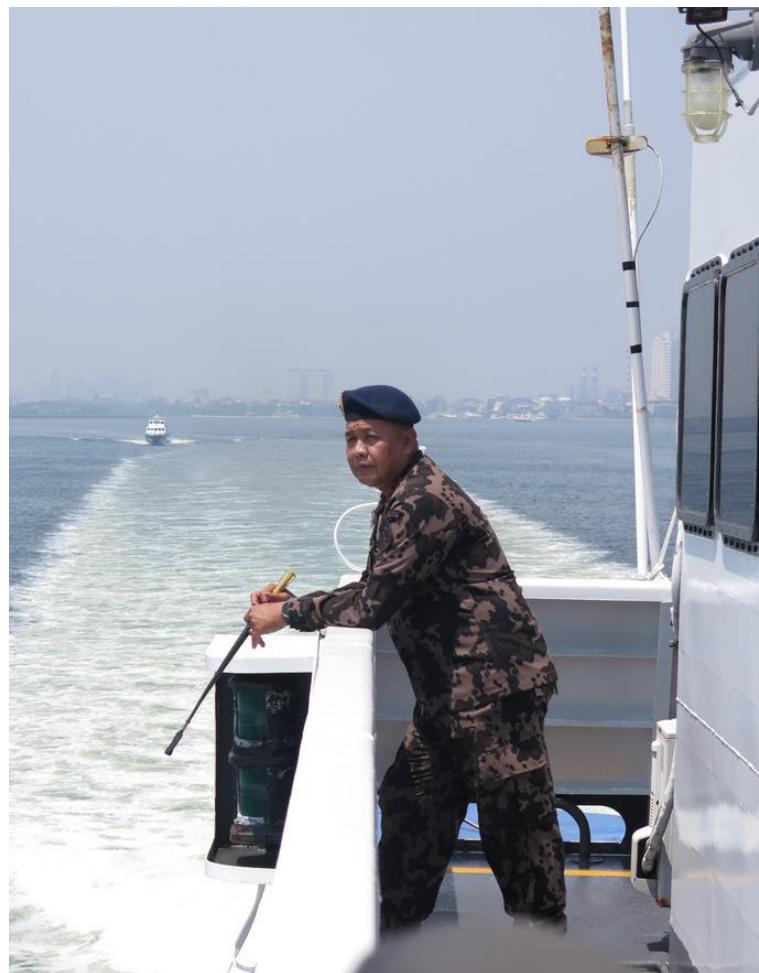
Lahir di Kroya pada 22 Oktober 1972, Sigit tumbuh dengan nilai-nilai kedisiplinan dan integritas yang kuat. Perjalanan pendidikannya menunjukkan konsistensi dalam pengembangan kompetensi di bidang kelautan dan perikanan. Pendidikan formal dimulai dari -

Akademi Usaha Perikanan dengan gelar Sarjana Muda, dilanjutkan dengan gelar Sarjana Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Universitas Satya Negara Indonesia, dan disempurnakan dengan gelar Magister Manajemen Perikanan dari Universitas Terbuka pada tahun 2024.

Sejak mengawali pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1998, ia telah menorehkan rekam jejak panjang di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP). Berbagai jabatan strategis pernah diemban, antara lain Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Jakarta (2017), Kepala Stasiun PSDKP Cilacap (2018-2019), Kepala Pangkalan PSDKP Tual (2019-2025), -

hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta sejak tahun 2025.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Sigit juga aktif mengikuti berbagai pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), baik di dalam maupun luar negeri. Pelatihan tersebut meliputi Training Course Penggunaan Drone, Training Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 9001:2015, Bimbingan Teknis Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Diklat Khusus PWP3K, serta berbagai pelatihan fungsional lainnya.



Selaras dengan tagline PSDKP Pantang Tercela, ia berkomitmen untuk memastikan nilai tersebut terimplementasi secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan. Di bawah kepemimpinannya, Pangkalan PSDKP Jakarta menjalankan fungsi pengawasan secara lebih terstruktur, profesional, dan berorientasi pada penegakan hukum yang adil serta berkelanjutan.

Dengan pengalaman, dedikasi, dan kepemimpinan yang dimilikinya, Sigit Bintoro terus mendorong Pangkalan PSDKP Jakarta menjadi institusi yang menjunjung tinggi nilai loyalitas, amanah, netralitas, ketegasan, integritas, kegigihan, dan akuntabilitas, sejalan dengan visi dan slogan Pangkalan PSDKP Jakarta.

Hi, Sahabat Bahari kalian tau ngga kalau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berperan sebagai pengelola layanan informasi yang menjembatani hak publik untuk memperoleh informasi dan kewajiban institusi untuk melindungi informasi yang dikecualikan Sementara itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didefinisikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.

Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Pelaksanaan PPID di lingkup Ditjen PSDKP didasarkan pada hierarki regulasi yang kuat:

- 1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2.PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
- 3.Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan



Dalam struktur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen PSDKP berposisi sebagai PPID Pelaksana Eselon I. Peran ini krusial sebagai koordinator bagi 14 PPID UPT (Pangkalan dan Stasiun PSDKP).

Struktur ini mewajibkan adanya aliran informasi dua arah: top-down untuk kebijakan dan SOP, serta bottom-up untuk informasi, laporan layanan dan penyediaan data lapangan.

Strategi Optimalisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPID di lingkungan Ditjen PSDKP, beberapa strategi berikut direkomendasikan:

1. Penguatan Kompetensi SDM:
Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) berkala khusus bagi operator PPID di 14 UPT, dengan fokus pada materi klasifikasi informasi dan penanganan sengketa.
2. Sentralisasi Uji Konsekuensi: Mengingat sensitivitas data pengawasan, penetapan Daftar Informasi Dikecualikan sebaiknya dikordinasikan secara ketat oleh PPID Eselon I agar memiliki dasar hukum yang kuat dan seragam di seluruh UPT.
3. Mekanisme Evaluasi Berkala Adakan monitoring dan evaluasi internal serta forum konsultasi publik periodik untuk menilai relevansi DIK, efektivitas layanan, dan kebutuhan pembaruan kebijakan.





Ask me anything!

Type something...

Rubrik yang menjawab pertanyaan dari kolom komentar media sosial Ditjen. PSDKP

username:
@elewarin_anshar007

Pertanyaan:

Kalau kapal saya alami trouble di laut, contoh mati mesin,, ga ada kapal di sekitar dan butuh bantuan karena cuaca buruk., apakah ketiga alat ini bisa mengirimkan sinyal bahaya ke darat

Perangkat Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan telah dilengkapi dengan tombol darurat (panic button).

Saat tombol ini ditekan, sistem akan mengirimkan informasi posisi kapal secara otomatis sebagai tanda bahwa kapal sedang berada dalam kondisi darurat. Sinyal tersebut diterima dan dipantau oleh Ditjen PSDKP, sehingga memudahkan proses pemantauan, koordinasi, dan tindak lanjut untuk memberikan bantuan secepat mungkin.

Selain itu, Ditjen PSDKP juga menyiapkan nomor pengaduan khusus yang dapat dihubungi apabila terjadi keadaan darurat atau membutuhkan bantuan di laut. Nomor pengaduan tersebut dapat ditemukan pada bio media sosial resmi Ditjen PSDKP.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem pengawasan dan respons cepat demi meningkatkan keselamatan kapal dan awak, sekaligus memastikan aktivitas perikanan berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab.



Bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera Kembali dikirimkan di Bandara Halim Perdanakusuma (02/12) yang dilepas langsung oleh Dirjen PSDKP sekaligus komandan satgas bencana KKP. Bantuan tersebut diangkut menggunakan pesawat Flag Off untuk mempercepat penyaluran ke wilayah terdampak. Penyaluran bantuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.





60 ton bantuan kemanusiaan disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh dan wilayah Sumatera melalui Pelabuhan Muara Baru (06/12). Penyaluran bantuan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono selaku Komandan Satgas KKP Peduli

Bencana Sumatra yang diangkut menggunakan Kapal Pengawas ORCA 06. Bantuan yang dikirim merupakan bentuk kepedulian KKP terhadap masyarakat pesisir terdampak bencana.



Bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disalurkan menggunakan KP. Orca 06 (06/12). Kemen PPPA bersama KKP berkolaborasi dalam pendistribusian bantuan sebagai bentuk sinergi lintas sektor ini bertujuan mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah terdampak serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kondisi bencana.





Bantuan kemanusiaan Satgas Bencana KKP tiba di Lhokseumawe dan Langsa, Aceh (02/12), melalui KP. HIU MACAN 05. Distribusi bantuan didukung personel Polres Lhokseumawe. Melalui koordinasi yang baik, bantuan disalurkan langsung ke rumah warga terdampak bencana.



Dirjen PSDKP menerima penghargaan bulan bakti. Penghargaan yang diberikan kepada Ditjen PSDKP setelah memenangkan rangkaian kegiatan bulan bakti yang telah dilaksanakan sebelumnya. Piala penghargaan diberikan oleh MKP pada acara Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (10/12)



Dirjen PSDKP selaku Ketua Satgas Bantuan Bencana KKP menerima bantuan dari pelaku usaha untuk korban bencana di Sumatera dalam rangkaian kegiatan pelepasan ekspor udang di Jakarta (03/12). Bantuan yang diterima merupakan bentuk partisipasi pelaku usaha dalam mendukung upaya kemanusiaan. Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan sektor usaha dalam penanganan bencana.





Dirjen PSDKP, Pung Saksono, mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Pelantikan Peserta Didik Baru Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Tahun 2025 (09/12)



Dirjen PSDKP menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Fakta Integritas dalam rangka Pengamanan Pembangunan Strategis *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)*





Dirjen PSDKP mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis DJPK Tahun 2025



Pelantikan Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP (01/12)





Peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan di Ballroom GMB III (16/12)



Pelantikan Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP (23/12)





Dirjen PSDKP menerima unjuk rasa dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di depan Gedung KKP (18/12)



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PSDKP dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di GMB I (24/12)



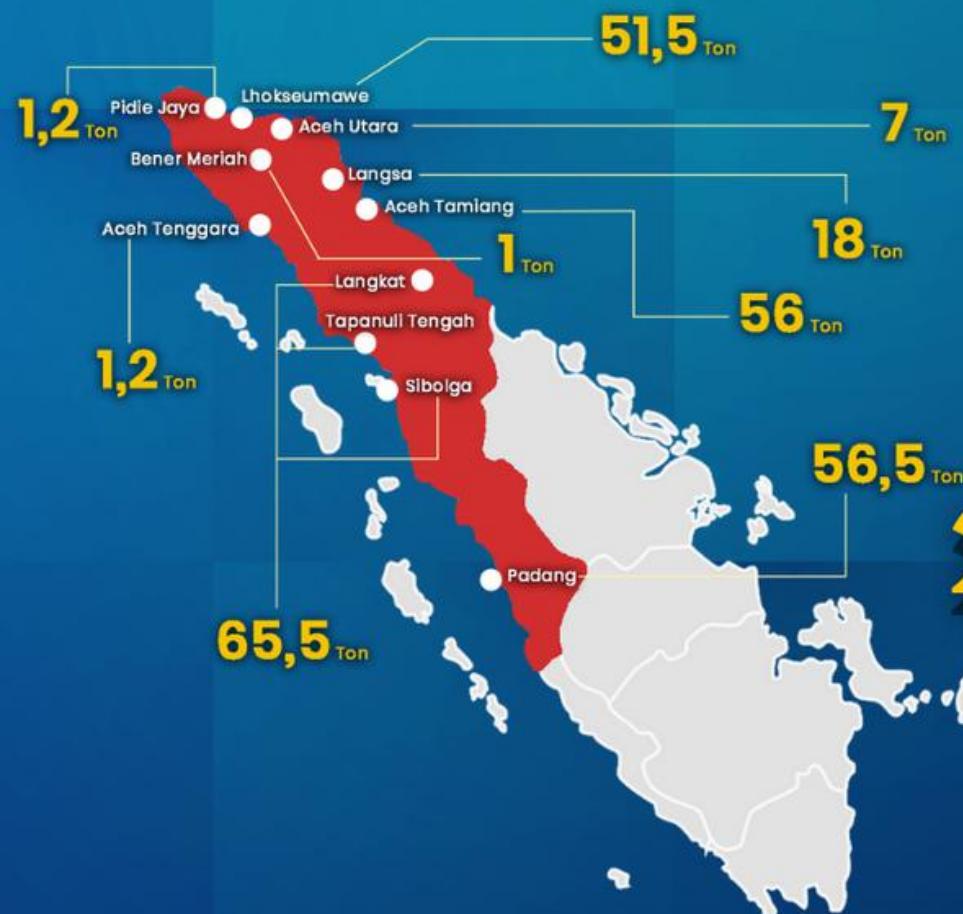


Kegiatan Lomba Inovasi di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, mulai dari pembukaan hingga pengumuman pemenang lomba (16/12) di Ruang Rapat Tuna





BANTUAN SATGAS KKP PEDULI BENCANA SUMATRA



Barang bantuan terdiri atas bahan makanan, ikan kaleng, genset mini, alat penjernih air, lilin/penerangan, pakaian layak pakai, pakaian baru, pakaian untuk balita dan perempuan dan kebutuhan spesifik, peralatan mandi, makanan siap saji, kasur, peralatan ibadah, dan peralatan sekolah.

257,9 TON
TOTAL BANTUAN

KOLABORASI



Kementerian
Negara/ Lembaga



Lembaga Swadaya
Masyarakat (NGO)



Pelaku Usaha kelautan
dan Perikanan



Masyarakat Umum



Pegawai KKP

Geser >>>

1/3





► ARMADA



► DISTRIBUSI JALUR LAUT



- KP Hiu 12 membawa bantuan ke Sibolga (3/12/2025) dan Langsa (7/12/2025).
- KP Hiu 16 membawa bantuan ke Lhokseumawe dan Langsa (7/12/2025).
- KP Hiu Macan 05 membawa bantuan ke Lhokseumawe dan Langsa (2/12/2025).
- KP Barakuda 01 membawa bantuan ke Lhokseumawe (4/12/2025).
- KP Orca 05 membawa bantuan ke Belawan (10/12/2025), ke Lhokseumawe (12/12.2025), ke Sibolga (15/12/2025), dan ke Padang (18/12/2025).
- KP Orca 06 membawa bantuan ke Padang (18/12/2025) dan ke Lhokseumawe (23/12/2025).

Geser >>> 2/3





JALUR DARAT

- **Tanggal 2 Desember 2025**, membawa bantuan ke Padang
- **Tanggal 17 Desember 2025**, membawa bantuan dari Belawan ke Aceh Tamiang
- **Tanggal 17 Desember 2025**, Membawa bantuan dari Belawan ke Aceh Utara



JALUR UDARA

- **Tanggal 2 Desember 2025**, membawa bantuan ke Lhokseumawe
- **Tanggal 5 Desember 2025**, membawa bantuan ke Aceh Tenggara
- **Tanggal 9 Desember 2025**, membawa bantuan ke Takengon, Aceh

<<< Geser 3/3





Keluarga Besar Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Mengucapkan



SELAMAT TAHUN BARU

2026

“Selamat Tahun Baru 2026 untuk Kita semua. Tahun 2025 mungkin penuh dengan tantangan, tapi kita berhasil melewatkannya karena kita saling Menguatkan. Semoga di tahun 2026, Kita diberikan kesehatan yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Aamiin.”



Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO, A.Pi., M.M.
Direktur Jenderal PSDKP

